

PROBLEMATIKA PENGELOLAAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK(RPTRA) DI KELURAHAN CAKUNG BARAT

Oleh : Atifah Prizilia Reza Dan Agus Kurniadi

Abstrak

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai area bermain dan belajar bagi anak-anak tidak hanya memiliki fungsi bagi anak-anak saja. Ada banyak aktivitas yang dapat mereka lakukan di RPTRA sebagai ruang publik dimana masyarakat dari berbagai macam latar belakang dapat hadir tanpa terkecuali yang diatur oleh Pergub DKI Jakarta Nomor 123 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Penelitian ini mengenai Implementasi Pergub tersebut di Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur. Masalah dalam penelitian ini ialah kehadiran RPTRA belum menarik minat masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis studi implementasi menggunakan model yang dikemukakan oleh Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan RPTRA belum berjalan optimal, dan kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh RPTRA.

Kata Kunci: RPTRA, implementasi, Pengelolaan Layanan Kegiatan RPTR

PENDAHULUAN

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Walaupun termasuk sebagai salah satu kota besar yang maju, Provinsi DKI Jakarta mempunyai beberapa permasalahan klasik diantaranya kemacetan, banjir, dan salah satunya mengenai isu kritis terkait pemenuhan hak-hak anak. Ruang publik memiliki peran penting dalam terjadinya perjumpaan dan kegiatan berinteraksi antar individu yang beragam dalam masyarakat. Pertumbuhan kota di Indonesia yang sangat pesat berdampak pada semakin terbatasnya ruang terbuka publik. Lahan di perkotaan yang semakin mahal dan di sisi lain kebutuhan hunian dan fasilitas publik yang semakin tinggi mengakibatkan ruang terbuka publik sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan ruang publik untuk bermain anak yang dapat diakses secara bebas juga semakin berkurang. Keterbatasan ruang publik untuk bermain anak menunjukkan hak anak untuk mendapatkan sarana dan prasarana belum

terpenuhi. Padahal setiap anak berhak mendapat tempat bermain aman dan mengedukasi serta tidak membahayakan bagi anak.

Menurut Dargan et al. (2006), anak-anak belajar melalui kegiatan bermain dalam lingkungan, berbagi ruang, membangun hubungan dan menjalin ikatan dengan tetangga mereka. Pendapat ini diperkuat oleh Fromberg dan Bergen (2015) yang mengatakan bagi sebagian besar anak bermain adalah kegiatan yang sama dengan bernafas, kegiatan bermain mengembangkan kemampuan anak dalam menggunakan bahasa, kompetensi sosial, berpikir kompleks serta menyelesaikan masalah secara kreatif. Dari pernyataan ini jelas bahwa kegiatan bermain bagi anak-anak merupakan kegiatan pembelajaran dalam memahami sesuatu serta menjalin hubungan sosial dan merupakan kesempatan saling memahami serta berbagi dengan sesama mereka.

Ketersedian ruang publik terpadu ramah anak yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dikelola oleh setiap kelurahan guna

memenuhi indikator-indikator kota layak anak (KLA) sebagai sarana dan prasarana bagi anak-anak. Pada tahun 2015 Gubernur DKI Jakarta kala itu dijabat oleh Basuki Tjahaya Purnama menginisiasi sebuah proyek perkotaan yang bernama Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). RPTRA salah satu jawaban konkret atas tantangan pembaungan perkotaan yang semakin lama semakin mengikis ruang publik, secara khusus ruang bermain dan beraktivitas bagi anak-anak. RPTRA menjadi program penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya para pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun dari pihak dunia usaha melalui sistem perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam bentuk fasilitas fisik dan non fisik secara terpadu. Seluruh kebijakan dan langkah strategis ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hak-hak anak. Ruang publik termasuk ke dalam kategori ramah anak karena di dalamnya terdapat taman bermain dan lapangan olahraga yang di khususkan sebagai tempat bermain yang aman untuk anak dan juga terdapat fasilitas edukasi untuk anak seperti perpustakaan, sehingga anak-anak di RPTRA tidak hanya bermain namun anak-anak juga dapat membaca buku. Anak-anak pun dapat mendapatkan edukasi-edukasi selagi bermain. Selain itu, RPTRA juga merupakan ruang publik yang bebas dari asap rokok.

RPTRA tidak hanya memiliki fungsi bagi anak-anak, tetapi juga memberikan signifikansi bagi masyarakat luas yang tinggal di Jakarta. Ada banyak aktivitas yang dapat mereka lakukan di RPTRA sebagai ruang publik dimana masyarakat dari berbagai macam latar belakang dapat hadir tanpa terkecuali. Pengelolaan RPTRA memiliki fungsi kegiatan yang mencerminkan layanan bagi anak, bagi masyarakat dan layanan kebencanaan. Ketiga jenis layanan tersebut menjadi kegiatan utama RPTRA yang menjadi wadah "*Community Center*" yang

berfungsi sebagai pusat interaksi warga dan pusat pelatihan dan pengembangan. RPTRA sebagai pusat interaksi warga ditandai dengan tersedianya antara lain : arena bermain bagi anak, lapangan olah raga bagi remaja, jalur refleksi dan kegiatan kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan serta ketrampilan kader PKK, usaha peningkatan pendapatan keluarga, pusat informasi dan konsultasi keluarga, halaman keluarga yang asri teratur indah dan nyaman serta sistem informasi manajemen. Semua sarana ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat dari berbagai kelompok umur, hal tersebut yang menjadikan RPTRA memang suatu fasilitas ruang publik yang ramah untuk anak. Dalam hal ini tampak bahwa RPTRA memenuhi aspek sosialitas antar individu.

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan tekanan pada kehadiran RPTRA sebagai solusi bagi masyarakat perkotaan. Dalam penelitian ini berdasarkan Pergub Nomor 123 Tahun 2017 mengenai Sistem Pengelolaan dan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kelurahan Cakung Barat mengenai layanan kegiatan yang belum maksimal, kurang aktifnya pengelola dan pemerintahan terkait dalam menghidupkan RPTRA dengan berbagai kegiatan. Selain itu lokasi ruang terbuka publik juga ikut berpengaruh terhadap penggunaan ruang tersebut. Ruang terbuka publik yang berada di pusat kota/desa lebih sering digunakan dibandingkan yang berada di pinggiran. Hal ini disebabkan masyarakat lebih senang berjalan kaki sehingga jarak menjadi faktor utama bagi mereka. Keberadaan RPTRA hanya dilihat sebagai area bermain saja bagi anak-anak. Dalam Pergub Nomor 123 Tahun 2017 RPTRA menyediakan fasilitas yang bisa digunakan oleh anak-anak dan pemberdayaan masyarakat, hanya saja sikap antusias dan partisipasi masyarakat dengan keberadaan RPTRA kurang responsif.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengelolaan layanan kegiatan RPTRA di Kelurahan Cakung Barat ?

Teori dan Konsep

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat Administrasi, hukum dan juga sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan. Situmorang Chazali (2016) juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahapan kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik. Implementasi adalah tahapan yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik, adapun proses pendekatan implementasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan menggunakan dua faktor utama yaitu internal dan eksternal. Faktor utama internal berkaitan dengan kebijakan yang akan diimplementasikan sedangkan faktor utama eksternal adalah berkaitan dengan kondisi lingkungan dari pihak terkait dalam implementasi kebijakan tersebut (Mulyadi, 2016). Pada aras pemahaman demikian, Udoji (dalam Agustino 2008) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya akan sekadar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Keberhasilan implementasi menurut

Merilee S. Grindle (dalam Subarsono 2021) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup : (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh, masyarakat di wilayah *slum areas* lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program sepeda motor; (3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Adapun variabel lingkungan kebijakan mencakup : (1) seberapa besar kekuasaan kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dalam pandangan Edwards III (dalam Subarsono, 2021) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat dimensi, yakni (1) komunikasi, berisi tentang implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. (2) sumber daya, Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif (3) disposisi, adalah menyangkut tentang Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran,

sifat demokratis, dan (4) struktur birokrasi, berisi tentang struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada *setting* partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan terakhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel (Creswell : 2012). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang biasanya menggunakan pedoman wawancara dengan maksud untuk mendapatkan berbagai informasi secara lengkap, mendalam, komprehensif, menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian terkait masalah yang diteliti yaitu implementasi kebijakan pengelolaan RPTRA di Kelurahan Cakung Barat.

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak mengenai layanan kegiatan (Studi pada Kelurahan Cakung Barat). Analisis menggunakan model implementasi dari Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Singkronisasi empat faktor ini menjadi tolak ukur yang penting dalam mengimplementasikan sebuah

program. Hal ini dikarenakan dari empat faktor tersebut dapat diketahui implementasi tersebut telah berjalan baik ataupun belum.

Komunikasi

Komunikasi diperlukan dalam suatu organisasi karena komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan proses komunikasi yang sudah dilakukan. Kemudian tentang kesulitan teknis dalam pengelolaan RPTRA, yaitu keragaman minat masyarakat untuk berkunjung dan berkegiatan di RPTRA, dan kegiatan-kegiatan apa saja di RPTRA yang menarik minat masyarakat sebagai target dan kelompok sasaran yang menjadi tujuan dari pelayanan RPTRA.

Kesulitan teknis dalam pengelolaan RPTRA di Kelurahan Cakung Barat yang disampaikan oleh Kepala Seksi Sarana Prasarana Kelurahan Cakung Barat, yaitu mengajak anak-anak dan masyarakat untuk berkegiatan dan ikut serta dalam kegiatan di RPTRA. Hal itu mengakibatkan minimnya interaksi dan komunikasi antara petugas RPTRA dan masyarakat sekitar dalam memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di RPTRA. Di Kelurahan Cakung Barat terdapat beberapa lokasi RPTRA, yaitu di Rusun Griya Tipar, Rusun Albo Lestari, Rusun Cempaka Sari, dan Pool Asri. Pada keempat RPTRA tersebut memiliki kendalanya masing-masing. RPTRA Pool Asri memiliki kegiatan yang paling sedikit diantara RPTRA yang lain dikarenakan RPTRA tersebut baru diresmikan pada tahun 2020. Oleh karena itu dari pihak Kelurahan dan pengelola RPTRA berusaha untuk menghidupkan RPTRA Pool Asri dengan berbagai kegiatan yang dapat menarik minat anak-anak dan masyarakat sekitar. Setiap bulan pihak kelurahan beserta ibu-ibu PKK dan seluruh pengelola melakukan

pertemuan rutin yang disingkat dengan Pertin. Pertin membahas kendala-kendala dan perkembangan dari kegiatan-kegiatan pada setiap RPTRA di Kelurahan Cakung Barat.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Sarana Prasarana Kelurahan Cakung Barat, ibu Emmy selaku Sekretaris RPTRA Kelurahan Cakung Barat memberikan pernyataan bahwa mengenai program kegiatan-kegiatan RPTRA pihak Kelurahan dan pengelola berusaha untuk menyosialisasikan pada masyarakat bahwa sudah adanya RPTRA di lingkungan mereka, dan memiliki kegiatan untuk anak-anak dan masyarakat dalam menambah wawasan, seperti kegiatan bela diri, pangan murah, dan senam dari dispora. Perlu upaya yang lebih antara komunikasi pengelola dan masyarakat dalam sosialisai kegiatan RPTRA (Selasa, 20 Juni 2023).

Adapun menurut ibu Ernawati selaku ketua PKK Kelurahan menyatakan bahwa pihak PKK pun ikut memantau dan berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang ada di setiap RPTRA, contohnya setiap ada kegiatan dari Puskesmas seperti Posyandu atau penyuluhan masyarakat mengajak warga pada setiap RW untuk berpartisipasi sehingga bisa memberikan informasi pada warganya mengenai kegiatan yang berada di RPTRA (Rabu, 05 Juli 2022). Ibu Murni salah seorang warga sekitar RPTRA Griya Tipar menyatakan bahwa untuk keberadaan RPTRA Cakung Barat saya sudah tahu, hanya saja lokasi RPTRA pada wilayah Cakung Barat lebih dekat dengan pemukiman rumah susun. Untuk warga yang tinggalnya tidak dirusun cukup jauh jalannya untuk berkunjung dan berkegiatan di RPTRA jadi perlu naik motor (Sabtu, 24 Juni 2023).

Komunikasi merupakan bagian dalam menyosialisasikan layanan kegiatan yang ada di RPTRA sesuai dengan Pergub Nomor 123 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak pada

layanan kegiatan sehingga para pelaksana kegiatan yaitu pihak Kelurahan dan pengelola RPTRA mengetahui layanan kegiatan apa saja yang harus ada di RPTRA dan masing-masing pengelola mengetahui tugas pokoknya sesuai dengan buku pedoman pengelolaan RPTRA. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan dalam program RPTRA bisa sesuai atau konsisten dengan apa yang menjadi tujuan dari program RPTRA. Namun seperti yang diketahui RPTRA Kelurahan Cakung Barat memiliki empat lokasi RPTRA, karenanya dalam proses pelaksanaan layanan kegiatan masih ada beberapa kesalahan yang muncul, tapi selama berjalannya proses itu semua bisa diperbaiki baik melalui evaluasi atau monitoring yang dilakukan secara intens.

Sumber Daya

Dimensi implementasi selanjutnya yaitu sumberdaya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya ini diperlukan untuk menunjang berjalannya program. Jika tidak ada sumber daya dalam melaksanakan program, maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Saat ini pengelola pada setiap RPTRA di Kelurahan Cakung Barat memiliki enam pengelola, seperti yang diungkapkan oleh ibu Tri sebagai Kepala Seksi Prasarana bahwa pengelola RPTRA berjumlah enam orang di setiap RPTRA. Sebenarnya pengelola RPTRA diharapkan berasal dari masyarakat sekitar, diharapkan seperti itu karena supaya yang bersangkutan bisa lebih fokus mengelola RPTRA. Kemudian jarak yang terlalu jauh dari tempat tinggal dapat menyebabkan keterlambatan dan mempengaruhi kinerja pengelola sehingga diutamakan masyarakat sekitar RPTRA. Pada saat ini sudah ada beberapa pengelola yang tempat tinggalnya tidak terlalu jauh (Rabu, 05 Juli

2023). Pendapat serupa juga diberikan oleh ibu Ernawati sebagai TP PKK Kelurahan Cakung Barat bahwa pemilihan pengelola RPTRA Kelurahan Cakung Barat dilakukan pada setiap tahunnya. Kader PKK pun ikut berperan dalam proses pemilihan pengelola RPTRA, yang diharapkan dapat memahami tugas, fungsi, dan kegiatan apa saja di RPTRA. Kegiatan tersebut dilakukan di RPTRA Melati Jaya dengan peserta pelatihan dari seluruh DKI Jakarta (Rabu, 05 Juli 2023). Salah satu warga menyatakan bahwa pada umumnya warga senang dengan adanya RPTRA. RPTRA bisa menjadi tempat bermain sekaligus belajar bagi anak yang aman dan kalau kenal dengan pengelola kita bisa nitip sebentar sama pengelolanya (ibu Arma, Sabtu, 24 Juni 2023). Sesuai pernyataan yang disampaikan oleh informan, bahwa dengan adanya pengelola yang berkompeten di setiap RPTRA diharapkan proses pelaksanaan program RPTRA, dalam hal ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sekitar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang ada sehingga menjadikan RPTRA tempat yang nyaman dan aman bagi masyarakat.

Fasilitas merupakan hal yang harus ada dalam implementasi program RPTRA. Mulai dari sarana dan prasarana yang berbentuk fisik hingga maupun non fisik. Fasilitas ini digunakan untuk mendukung berjalannya proses kegiatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat khususnya kepada anak-anak. Pelaksanaan dalam program RPTRA ini menggunakan banyak sekali fasilitas seperti ruang perpustakaan yang di dalamnya terdapat rak buku, buku, meja, bangku, karpet juga AC serta CCTV. Kemudian pada ruang laktasi ada tempat tidur bayi dan beragam kebutuhan ibu dan anak. Sedangkan untuk *outdoor*, fasilitas yang digunakan antara lain lapangan futsal, taman bermain untuk anak, juga beberapa lahan untuk kebun. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu Tuti Selaku Kepala Seksi Sarana Prasarana Kelurahan Cakung Barat,

penyediaan fasilitas yang berada di RPTRA Kelurahan Cakung Barat sudah lengkap dan sesuai dengan pedoman pengelola RPTRA, tinggal bagaimana pengelola bersinergi dengan PKK merawat fasilitas yang sudah ada, dan mengajak masyarakat untuk menggunakan dan merawatnya, seperti kebun yang ada di RPTRA bisa digunakan untuk menanam tanaman yang bisa dijual dan dikonsumsi, sebagai pemberdayaan masyarakat (ibu Tuti, Selasa, 20 Juni 2023).

Peneliti juga mewawancarai beberapa informan, yaitu bapak Tama selaku koordinator RPTRA Griya Tipar. Menurut pak Tama, fasilitas di RPTRA Griya Tipar sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan RPTRA, hanya saja untuk kolam budidaya ikan lele dan kebun jagung belum berjalan dengan maksimal. Untuk fasilitas *outdoor*nya kemarin sempat mengalami kerusakan dan sudah diperbaiki, harapannya untuk pengelola bisa mengajak anak-anak dan masyarakat yang berkunjung untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang sudah ada (bapak Tama, Sabtu, 24 Juni 2023). Pendapat serupa juga diberikan oleh ibu Iis sebagai koordinator RPTRA Albo Lestari. Menurut ibu Iis, kegiatan dan fasilitas di RPTRA Albo Lestari sudah sama dengan RPTRA yang lainnya. Kegiatan di RPTRA Albo pun sangat beragam, RPTRA Albo memiliki akses yang mudah dijangkau untuk warga Cakung Barat karena lokasinya tidak terlalu jauh dari jalan raya dan kebun di RPTRA Albo cukup luas dengan kondisi tanah dan air yang baik sehingga bisa digunakan untuk kebun jagung dan apotek hidup (ibu Iis, Sabtu 08 Juli 2023).

Menurut ibu Putri, pengelola RPTRA Pool Asri, RPTRA Pool Asri termasuk RPTRA yang belum lama berdiri diantara RPTRA lainnya di Kelurahan Cakung Barat. Untuk fasilitas secara bertahap sudah mulai lengkap, hanya saja untuk kegiatan masih sedikit dan minat masyarakatnya masih kurang. Lokasi RPTRA Pool Asri jauh dari jalan raya, dan

kondisi tanahnya belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk berkebun (ibu Putri, Sabtu 08 Juli 2023). Pendapat serupa juga diberikan oleh bapak Andi sebagai pengelola RPTRA Cempaka Sari, lokasi RPTRA Cempaka Sari yang berada tidak terlalu jauh dari jalan tol dan lumayan jauh dari RPTRA lainnya yang berada di Cakung Barat, fasilitas yang berada di RPTRA Cempaka Asri sudah lengkap dan sesuai dengan pedoman pengelolaan RPTRA. Untuk kegiatan sudah mulai aktif kembali setelah masa pandemi Covid 19, hanya saja untuk minat masyarakat sekitarnya belum seaktif dulu, saat belum adanya covid-19 (bapak Andi, Sabtu, 08 Juli 2023). Adapun menurut ibu Ririn selaku koordinator Kelurahan RPTRA Cakung Barat, untuk kegiatan di RPTRA Cakung Barat mengalami penurunan drastis saat pandemi Covid 19 dan saat ini secara berangsur-angsur mulai kembali normal. Kegiatan-kegiatan yang tadinya ditiadakan sudah aktif kembali, dan kami juga mengajak anak-anak dan masyarakat untuk ikut serta dengan kegiatan yang ada di RPTRA Kelurahan Cakung Barat (ibu Ririn, Sabtu, 08 Juli 2023).

Disposisi

Salah satu keberhasilan dari sebuah implementasi adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Di dalam implementasi pengelolaan RPTRA di Kelurahan Cakung Barat, kemauan dari para pengelola dalam melayani masyarakat yang datang ke RPTRA juga berpengaruh pada berjalan atau tidaknya implementasi kebijakan tersebut.

Pelaksanaan implementasi program RPTRA di Kelurahan Cakung Barat tidak terlepas dari pengelola RPTRA sebagai pelaksana program. Dimana pengangkatan dan penempatan dari pengelola RPTRA

menjadi hal yang penting, karena pelaksana program yang tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik akan menjadi beban dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam penempatan pengelola RPTRA diharapkan berasal dari masyarakat sekitar karena dapat lebih fokus dalam mengelola dan lebih mempunyai rasa memiliki. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh ibu Tuti sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana, dalam proses merekrut pengelola RPTRA terdapat proses perekrutan khusus, dimana pengelola bukan hanya menjaga RPTRA, tetapi juga terlibat dalam mendidik anak-anak. Setelah tahap seleksi Administrasi terdapat proses selanjutnya melalui *Focus Group Discussion* (FGD) atau disebut juga diskusi kelompok yang terarah. Pada tahap FGD, kita beri topik, diundi topiknya, karena bagaimanapun dia akan mendidik masyarakat, melatih masyarakat. Kalau dia kemampuannya tidak bisa bicara, gimana dia mau mengajarkan dan mendidik masyarakat kalau dia tidak bisa bicara. Jadi kemampuan verbal, terus kemampuan non verbalnya juga dilihat. Selama masa pandemi kemarin, FGD dilakukan secara *online* melalui *zoom* bersama peserta lainnya. Setelah itu juga wawancara. Jadi diwawancara itu juga kita melihat bagaimana si calon pengelola ini dari sisi kepribadiannya, kemampuan *skill attitude*. Apakah memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap anak-anak, permasalahan masyarakat, kondisi sosial masyarakat (Selasa, 20 Juni 2023). Pendapat serupa juga diberikan oleh ibu Ernawati sebagai TP PKK Kelurahan Cakung Barat, pada masa pandemi tahun kemarin, banyak layanan kegiatan yang ditiadakan dan sesudah masa pandemi kegiatan mulai diaktifkan. Hal tersebut menjadi tantangan pengelola untuk bisa menghidupkan kembali RPTRA dengan mengajak anak-anak dan masyarakat untuk berkegiatan di RPTRA (Rabu, 05 Juli 2023).

Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan dimensi terakhir yang mencakup ruang lingkup pembagian kewenangan, hubungan antar unit yang terlibat, dan hubungan antar organisasi. Dalam organisasi terdapat *standard operating procedures* atau yang sering kita kenal dengan SOP. SOP merupakan bentuk mekanisme keseragaman dalam ruang kerja organisasi yang kompleks untuk memberi kemudahan para aktor pelaksana dalam organisasi.

Struktur organisasi memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 123 tahun 2017 karena dalam pelaksanaan Pergub tersebut perlu adanya suatu kerja sama antar bagian yang ada dalam pengelola maupun pihak Kelurahan yang terlibat dalam pelaksanaan Pergub. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Tuti sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana di Kelurahan Cakung Barat, setiap RPTRA memiliki enam pengelola dengan program kerja yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam menjalankan perannya. Seperti halnya yang mengurus perpustakaan ada sendiri pengelolanya, dia bertugas merawat aset buku yang ada, dan mengawasi anak-anak yang berada di perpustakaan. Demikian pula untuk pengelola yang lainnya mengerjakan tugas yang lain dan sesuai dengan Pergub yang ada. Jadi marketnya jelas (masyarakat), sarananya jelas (Selasa, 20 Juni 2023). Pendapat serupa juga di berikan oleh ibu Ernawati sebagai TP PKK Kelurahan Cakung Barat, pengelola RPTRA dan PKK saling bersinergi dalam kegiatan-kegiatan yang berada di RPTRA. Misalnya, perpustakaan tugasnya itu mengawasi buku-buku yang ada. Untuk kesehatan tersedia ruang laktasi, kelautan tersedia kolam ikan, pertamanan untuk menanam kebun sayur maupun apotek hidup, kalau PKK sendiri itu ada PKK-Mart. Jadi tidak ada tumpang tindih peran disini. (ibu Ernawati , 05 Juli 2023).

Pembahasan

Pengelolaan layanan kegiatan RPTRA di Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung dilaksanakan oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kelurahan Cakung Barat dan bersinergi dengan tim TP PKK. Mengacu pada Pergub Nomor 123 tahun 2017, layanan kegiatan meliputi layanan anak, layanan masyarakat dan layanan kebencanaan. Fungsi dari RPTRA sendiri adalah pertama ruang terbuka untuk publik, kedua wahana permainan dan tumbuh kembang anak, ketiga sarana kegiatan sosial warga, keempat pengembangan pengetahuan dan keterampilan kader PKK, kelima ruang terbuka hijau. Adapun kendala dalam implementasinya adalah kurangnya minat anak-anak dan masyarakat untuk berkunjung dan berkegiatan di RPTRA serta kegiatan-kegiatan di RPTRA yang belum beragam. Mengingat saat ini fungsi RPTRA tidak lagi hanya sekedar dijadikan sebagai tempat bermain untuk anak melainkan juga sebagai tempat edukasi dan pemberdayaan bagi masyarakat, pengelola RPTRA selaku implementator dari kebijakan tersebut memiliki peran yang penting dalam meningkatkan minat masyarakat dan anak-anak melalui beragam kegiatan. Dalam Pergub No 123 Tahun 2017 pada bab IV mengenai layanaan kegiatan bahwa RPTRA melaksanakan layanan bagi anak, masyarakat dan kebencanaan. Untuk layanan anak terdiri dari kegiatan posyandu, perpustakaan anak, tempat olahraga anak, tempat bermain bagi anak dan kegiatan kreatif anak. Untuk kegiatan layanan masyarakat 10 (sepuluh) program pokok PKK terdiri dari PKK-Mart, kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman atau prasarana dan sarana yang ada, olah raga dan kegiatan kesenian. Bagi layanan kebencanaan terdiri dari layanan atau kegiatan komunikasi, informasi, edukasi bencana, rambu bencana, tempat pengungsian sementara, layanan pasca bencana, kegiatan trauma (*healing*).

Pengelolaan RPTRA untuk saat ini sudah dilaksanakan sesuai dengan Pergub No 123 tahun 2017.

Anak-anak dan masyarakat adalah orang-orang yang merasakan manfaat dari hadirnya RPTRA. Karena itulah implementasi layanan kegiatan merupakan poin penting dalam kebijakan RPTRA. Dalam hal komunikasi antar pengelola sudah berjalan dengan baik dan masyarakat pun sudah mengetahui kehadiran RPTRA. Namun dari sisi antusias, masyarakat masih kurang karena sebagaimana masyarakat hanya mengetahui RPTRA sebagai tempat bermain anak, masih diperlukan sosialisasi mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di RPTRA. Sumber daya dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu sumberdaya manusia dan sumber daya fasilitas. Untuk sumber daya manusia menurut Edward III (dalam Widodo, 2009) mengungkapkan bahwa sumber daya manusia harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian), karena efektifitas pelaksanaan sangat tergantung kepada sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan implementasi. Sumber daya manusia harus mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga mereka harus mempunyai informasi yang cukup dalam mengenai RPTRA, tidak hanya berkaitan dengan bagaimana cara melakukan kegiatan atau program. Para pengelola pun sudah melewati tahap seleksi sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya. Untuk sumber daya fasilitas RPTRA di Kelurahan Cakung sudah sesuai dengan Pergub No 123 tahun 2017. Disposisi dalam hal ini sudah berjalan dengan cukup baik, pengangkatan pengelola dan juga penempatan pengelola berdasarkan jarak tempuh dengan lokasi RPTRA. Peneliti berpendapat bahwa penempatan pengelola berdasarkan jarak tempuh antara tempat tinggal dengan lokasi RPTRA sangatlah bagus, mengingat ketepatan waktu dan rasa lebih memiliki itu diperlukan untuk menjalankan sebuah implementasi agar

lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengelola RPTRA yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi RPTRA akan lebih tau apa yang sedang menjadi masalah di lingkungannya. mereka pun dapat mengetahui solusi terbaik dan tercepat yang dapat diberikan kepada masyarakat terkait masalah yang ada di sekitar lokasi RPTRA. Struktur organisasi pada RPTRA Kelurahan Cakung Barat sudah berjalan dengan baik dan juga pembagian program kerja antar pengelola di RPTRA sudah berjalan dengan baik, dimana sudah dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan dalam pelayanannya kepada masyarakat. Walaupun demikian perlu adanya peningkatan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat dengan pengelola yang berada langsung di RPTRA sehingga ke depannya perkembangan RPTRA dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

Kesimpulan

RPTRA merupakan inoasi pemerintah dalam mewujudkan kota layak anak. Pada laman pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga DKI Jakarta mencatat sampai dengan Desember 2020 terdapat 322 RPTRA dengan fasilitas yang relatif lengkap mulai dari area bermain, perpustakaan dan aula sebagai sarana kegiatan sosial. RPTRA membutuhkan pengelolaan dari sumber daya manusia yang berkompeten untuk mewujudkan tujuan dari berdirinya RPTRA. Tujuan dari RPTRA salah satu nya untuk mewujudkan kota layak anak sebagai pemenuhan atas hak-hak anak dapat hidup, tumbuh berkembang, perlindungan dan berpartisipasi secara optimal, serta meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader PKK dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan beserta keluarganya. Di Kelurahan Cakung Barat saat ini sudah memiliki empat RPTRA yang berdekatan dengan rumah susun dan pemukiman rumah warga, terdiri dari RPTRA Griya Tipar, RPTRA Albo Lestari,

RPTRA Cempaka Sari, dan RPTRA Pool Asri. Di setiap RPTRA memiliki enam pengelola dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda, terdiri dari koordinator, sekretaris, bendahara, sarpras, humas, dan *gross mart*. Pihak kelurahan pun memilih satu koordinator dari pengelola untuk menjadi koordinator kelurahan dalam memonitoring, melaporkan masalah yang ada pada setiap RPTRA. Hal tersebut nantinya akan disampaikan dalam pertemuan rutin (pertin) yang dilakukan setiap satu bulan sekali bersama pihak Kelurahan Cakung Barat, kader PKK dan seluruh pengelola RPTRA Kelurahan Cakung Barat. Layanan kegiatan yang diberikan RPTRA saat ini cukup beragam mulai dari layanan kegiatan pusat informasi keluarga, layanan kegiatan bina keluarga balita, pendidikan anak usia dini (BKB-PAUD), layanan kegiatan posyandu, kegiatan olahraga, layanan perpustakaan, layanan kegiatan kebun gizi, layanan kegiatan kebun obat-obatan keluarga, layanan kegiatan seni dan budaya, layanan PKK *gros mart* dan keamanan pada CCTV di setiap RPTRA.

A. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lapangan, maka penulis mengajukan beberapa saran perbaikan yang dapat dijadikan bahan masukan dalam upaya pemecahan masalah. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pihak kelurahan dan SKPD terkait perlu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan layanan kegiatan di RPTRA supaya tercapai maksud dan tujuan peningkatan minat anak-anak dan masyarakat melalui layanan kegiatan, serta melakukan evaluasi untuk menilai kegiatan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan pengelola layanan kegiatan secara terstruktur dan objektif.
2. Perlunya dukungan dari pihak-pihak terkait mensosialisasikan dan menambah kegiatan-kegiatan yang

beragam dalam menghidupkan RPTRA sehingga menarik minat anak-anak dan masyarakat untuk berkunjung dan bermain di RPTRA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dunn, William 1981. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Subarsono 2021. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Taufiqurakhman 2014. Kebijakan Publik. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (pers)
- Prabawati Indah, Tjitjik Rahaju. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Surabaya: Unesa University Press
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Perpustakaan Nasional
- Raco 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Hayat 2021. Manajemen Pelayana Publik. Depok : RajaGrafindo Persada
- Silalahi Ulber. 2011. Asas-Asas Manajemen. Bandung : PT Refika Aditama
- Rahmayanty, Nina. 2013. Manajemen Pelayanan Prima. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Kadarsiman, M. 2012. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Jurnal

- Sucia, Dara andi , (2019) Implementasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara. Jurnal Of Government volume 5 nomor 1 : 40-51
- Pratiwi, Tasrin Krismiyati. (2018). Implementasi Kebijakan Program

- Inovasi Wisata Buku Sahabat Anak di Kabupaten Ciamis volume 21 nomor 1 : 95-115
- Alman M, Sofia P, Josef K (2018) Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Pinkolan Kota Bitung. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah, Volume 1 nomor 1: 01-09
- Afifah, Yuniza Hafnilah . (2022). Meningkatkan Perkembangan Moral Aspek Kontrol Diri Terhadap Meningkatkan Perkembangan Moral Aspek Kontrol Diri Terhadap Kebersihan Lingkungan Melalui Bakti Sosial Pada Anak-anak Rusun Griya Tipar Cakung. Jurnal Pengabdian pada masyarakat volume 1 nomor 2. 150-156
- Sutmasa, Gede Y (2019). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di dusun badegan desa bantul kecamatan bantul, kabupaten bantul. Volume 4 nomor 1. 25-35
- Rakasiwi shugy (2019) Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) (study pada RPTRA Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat . Skripsi.

Peraturan

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Pedoman pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Web https://www.dprkp.jakarta.go.id/info/kegiatan_yang_dinaungi_RPTRA